

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Propinsi Jawa Timur

Jawa Timur terletak di bagian timur Pulau Jawa dengan ibu kota Surabaya. Wilayah Jawa Timur membentang antara $111^{\circ}0'$ BT – $114^{\circ}4'$ BT dan $7^{\circ}12'$ LS – $8^{\circ}48'$ LS. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, selat Bali di timur, samudra Hindia di selatan, serta Propinsi Jawa Tengah di barat. Wilayah Jawa Timur meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, Pulau Kangean serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa dan Samudra Hindia. Jawa Timur merupakan wilayah terluas di Pulau Jawa (47.963 Km^2), dihuni oleh sekitar 37.687.622 jiwa dan merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat.

Jawa Timur memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional secara cukup signifikan, yakni mencapai 14,8 persen terhadap total perekonomian Indonesia. Jawa Timur juga merupakan pusat perekonomian di wilayah timur Indonesia. Provinsi Jawa Timur juga memiliki sejumlah industri besar, diantaranya galangan pembuatan kapal terbesar di Indonesia PT PAL Surabaya, industri kereta api terbesar di Asia Tenggara PT INKA di Madiun, pabrik kertas, pabrik rokok, dan pabrik semen. Sentra industri kecil tersebar di seluruh kabupaten/kota, dan beberapa di antaranya telah menembus pasar ekspor, seperti industri kerajinan kulit berupa tas dan sepatu di Tanggulangin, Sidoarjo yang merupakan salah satu industri kecil yang sangat terkenal.

Mayoritas penduduk Jawa Timur adalah Suku Jawa, selain itu juga terdapat suku lain seperti suku Madura yang mendiami Pulau Madura dan daerah Tapal Kuda di Jawa Timur. Terdapat pula suku Tengger yang berada di sekitar Gunung Bromo, Probolinggo, serta suku Osing yang mendiami Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, Jawa Timur juga banyak didiami oleh suku pendatang, meliputi suku Arab dan Tionghoa.

Meskipun Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang berlaku secara nasional, namun Bahasa Jawa sangat dominan digunakan dalam pergaulan, utamanya dengan dialek Jawa Timuran yang sangat khas. Ciri khas Bahasa Jawa Timur adalah egaliter, blak-blakan, dan seringkali mengabaikan tingkatan bahasa layaknya Bahasa Jawa baku, sehingga bahasa ini terkesan kasar. Namun demikian, penutur bahasa ini dikenal cukup fanatik dan bangga dengan bahasanya.

Jumlah penduduk terbesar di Propinsi Jawa Timur terdapat di Kota Surabaya, diikuti oleh Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember. Ketiga daerah ini mempunyai jumlah penduduk di atas 2 juta jiwa. Secara keseluruhan, kepadatan penduduk di Jawa Timur berkisar 780 jiwa per km². Kota Surabaya merupakan daerah dengan kepadatan penduduk paling tinggi di Jawa Timur, yaitu mencapai 8.400 jiwa per km². Komposisi penduduk di Jawa Timur didominasi oleh usia produktif (15 – 64 tahun), yang mencapai lebih dari 68% penduduk. Sementara angka ketergantungan mencapai 47%, yang berarti setiap 100 orang usia produktif menanggung 47 orang usia non produktif.

Berdasarkan keseluruhan panjang jalan di Jawa Timur sepanjang 41.733 km, sebagian besar merupakan jalan kabupaten/kota (91%). sebagian besar jalan kabupaten/kota di Jawa Timur berada dalam kondisi baik yaitu mencapai 72%. Demikian juga untuk jalan negara dan jalan provinsi relatif kondisinya sangat baik. Untuk jalan negara hanya 19,5% yang berda dalam kondisi rusak, sementara untuk jalan Propinsi hanya 19% yang dalam kondisi rusak.

Tabel 4.1 berikut menyajikan data Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

Tabel 4.1
Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
1.	Kab. Bangkalan	20.	Kab. Pasuruan
2.	Kab. Banyuwangi	21.	Kab. Ponorogo
3.	Kab. Blitar	22.	Kab. Probolinggo
4.	Kab. Bojonegoro	23.	Kab. Sampang
5.	Kab. Bondowoso	24.	Kab. Sidoarjo
6.	Kab. Gresik	25.	Kab. Situbondo
7.	Kab. Jember	26.	Kab. Sumenep
8.	Kab. Jombang	27.	Kab. Trenggalek
9.	Kab. Kediri	28.	Kab. Tuban
10.	Kab. Lamongan	29.	Kab. Tulungagung
11.	Kab. Lumajang	30.	Kota Blitar
12.	Kab. Madiun	31.	Kota Kediri
13.	Kab. Magetan	32.	Kota Madiun
14.	Kab. Malang	33.	Kota Malang
15.	Kab. Mojokerto	34.	Kota Mojokerto
16.	Kab. Nganjuk	35.	Kota Pasuruan
17.	Kab. Ngawi	36.	Kota Probolinggo
18.	Kab. Pacitan	37.	Kota Surabaya
19.	Kab. Pamekasan	38.	Kota Batu

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan kompensasi kepada masyarakat berupa pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian kabupaten/kota dalam pembangunan daerahnya, sehingga tidak selalu tergantung kepada bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi. Salah satu langkah yang dapat ditempuh Pemerintah Daerah adalah dengan memberikan kemudahan dalam investasi bagi sektor swasta sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi pada sektor swasta.

Tabel 4.2 berikut menunjukkan data statistik deskriptif Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur untuk Tahun 2009 – 2012.

Tabel 4.2

Statistik Deskriptif PAD Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur

Tahun 2009–2012 (dalam jutaan rupiah)

	2009	2010	2011	2012
Minimum	17.387	17.736	30.242	38.794
Maksimum	809.796	1.036.167	1.886.514	2.279.610
Rata-Rata	88.345	98.057	152.028	191.363
Standar Deviasi	130.193	164.005	300.178	366.722

Sumber: Hasil Analisis Data dari BPS dan Realisasi APBD

Berdasarkan Tabel 4.2 diperoleh informasi bahwa pada tahun 2009 Kota Surabaya memperoleh PAD terbesar, dengan nilai sekitar 809 miliar rupiah, sedangkan perolehan PAD paling rendah dimiliki Kota Batu dengan nilai sekitar 17,387 miliar rupiah. Rata-rata perolehan PAD Propinsi Jawa Timur pada tahun 2009 adalah sebesar 88 miliar rupiah. Nilai standar deviasi sebesar 130 miliar menunjukkan adanya variasi tingkat perolehan PAD antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur sebesar 147,37% dibandingkan nilai rata-rata PAD, yang menunjukkan perbedaan PAD yang tinggi antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur.

Tahun 2010 Kota Surabaya masih memperoleh PAD terbesar, dengan nilai sekitar 1,036 triliun rupiah, sedangkan perolehan PAD paling rendah juga tetap dimiliki Kota Batu dengan nilai sekitar 17,736 miliar rupiah, namun ada sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Rata-rata perolehan PAD Propinsi Jawa Timur pada tahun 2010 adalah sebesar 98 miliar rupiah. Nilai standar deviasi sebesar 164 miliar menunjukkan adanya variasi tingkat perolehan PAD antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur sebesar 167,26% dibandingkan nilai rata-rata PAD, yang menunjukkan perbedaan PAD yang tinggi antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur, meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya.

Tahun 2011 Kota Surabaya masih memperoleh PAD terbesar, dengan nilai sekitar 1,886 triliun rupiah, sedangkan perolehan PAD paling rendah juga tetap dimiliki Kota Batu dengan nilai sekitar 30 miliar rupiah, terjadi peningkatan cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya. Rata-rata perolehan PAD Propinsi

Jawa Timur pada tahun 2011 adalah sebesar 152 miliar rupiah. Nilai standar deviasi sebesar 300 miliar menunjukkan adanya variasi tingkat perolehan PAD antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur sebesar 197,45% dibandingkan nilai rata-rata PAD, yang menunjukkan perbedaan PAD yang tinggi antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur, meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya.

Tahun 2012 Kota Surabaya masih memperoleh PAD terbesar, dengan nilai sekitar 2,279 triliun rupiah, sedangkan perolehan PAD paling rendah juga tetap dimiliki Kota Batu dengan nilai sekitar 38 miliar rupiah, terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Rata-rata perolehan PAD Propinsi Jawa Timur pada tahun 2012 adalah sebesar 191 miliar rupiah. Nilai standar deviasi sebesar 366 miliar menunjukkan adanya variasi tingkat perolehan PAD antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur sebesar 191,64% dibandingkan nilai rata-rata PAD, yang menunjukkan perbedaan PAD yang masih tinggi antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur, namun lebih rendah dibanding dengan tahun sebelumnya.

Sebagian besar Kabupaten/Kota di Jawa Timur mengalami peningkatan PAD dari tahun ke tahun, hanya pada tahun 2010 beberapa Kabupaten/Kota mengalami penurunan nilai PAD dibandingkan tahun 2009, yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, dan Kota Pasuruan. Penurunan PAD tertinggi dialami oleh Kabupaten Tuban dengan prosentase penurunan PAD sebesar 29,06%. Selain itu pada tahun 2012 juga ada dua

Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan nilai PAD dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu Kabupaten Bojonegoro dan Kota Pasuruan.

Secara keseluruhan dari tahun 2009 sampai dengan 2012, Kabupaten Ngawi memiliki rata-rata peningkatan PAD dari tahun ke tahun yang paling tinggi, yaitu sebesar 43,84%, sedangkan Kota Pasuruan menunjukkan perkembangan PAD paling rendah, yaitu sebesar 7,29%. Rata-Rata perkembangan PAD seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur adalah sebesar 26,60%.

4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Perimbangan ditujukan untuk membantu daerah dalam mendanai keberlangsungan Pemerintahan Daerah untuk menjalankan kewenangannya, serta untuk mengurangi ketimpangan (kesenjangan fiskal) sumber pendanaan pemerintah antara alokasi dari pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mengurangi kesenjangan pendanaan antar Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU mempunyai bagian yang cukup besar dalam dana perimbangan. Karena besarnya yang cukup tinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka peran DAU cukup penting dalam pembangunan suatu daerah, namun ketergantungan terhadap DAU juga tidak baik karena tujuan dari DAU adalah untuk pemerataan kesejahteraan. Besarnya DAU ditentukan oleh faktor kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah. Semakin besar kebutuhan wilayah otonomi suatu daerah dan semakin

kecil potensi daerahnya maka akan semakin tinggi pula DAU yang diperoleh dari Pemerintah Pusat.

Tabel 4.3 menunjukkan data statistik deskriptif Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur untuk Tahun 2009 –2012.

Tabel 4.3

Statistik Deskriptif DAU Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur

Tahun 2009 – 2012 (dalam jutaan rupiah)

	2009	2010	2011	2012
Minimum	218.135	231.964	263.950	319.425
Maksimum	959.099	967.107	1.048.944	1.281.610
Rata-Rata	533.200	549.780	601.847	730.780
Standar Deviasi	141.708	136.947	149.174	196.304

Sumber: Hasil analisis data dari BPS dan Realisasi APBD

Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh informasi bahwa pada tahun 2009 Kabupaten Malang memperoleh DAU terbesar, dengan nilai sekitar 959 miliar rupiah, sedangkan yang menerima DAU paling rendah adalah Kota Batu dengan nilai sekitar 218 miliar rupiah. Rata-rata penerimaan DAU Propinsi Jawa Timur pada tahun 2009 adalah sebesar 533 miliar rupiah. Nilai standar deviasi sebesar 141 miliar menunjukkan adanya variasi tingkat penerimaan DAU antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur sebesar 26,58% dibandingkan nilai rata-rata DAU, perbedaannya tidak terlalu tinggi antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur.

Tahun 2010 Kabupaten Malang masih memperoleh DAU terbesar, dengan nilai sekitar 967 miliar rupiah, sedangkan yang menerima DAU paling

rendah adalah Kota Pasuruan dengan nilai sekitar 231 miliar rupiah. Rata-rata penerimaan DAU Propinsi Jawa Timur pada tahun 2010 adalah sebesar 549 miliar rupiah. Nilai standar deviasi sebesar 136 miliar menunjukkan adanya variasi tingkat penerimaan DAU antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur sebesar 24,91% dibandingkan nilai rata-rata DAU, lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Tahun 2011 Kabupaten Malang masih memperoleh DAU terbesar, dengan nilai sekitar 1,048 triliun rupiah, sedangkan yang menerima DAU paling rendah adalah tetap Kota Pasuruan dengan nilai sekitar 263 miliar rupiah. Rata-rata penerimaan DAU Propinsi Jawa Timur pada tahun 2011 adalah sebesar 601 miliar rupiah. Nilai standar deviasi sebesar 149 miliar menunjukkan adanya variasi tingkat penerimaan DAU antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur sebesar 24,79% dibandingkan nilai rata-rata DAU, menurun sedikit dari tahun sebelumnya.

Tahun 2012 Kabupaten Malang juga masih memperoleh DAU terbesar, dengan nilai sekitar 1,281 triliun rupiah, sedangkan yang menerima DAU paling rendah juga masih tetap Kota Pasuruan dengan nilai sekitar 319 miliar rupiah. Rata-rata penerimaan DAU Propinsi Jawa Timur pada tahun 2012 adalah sebesar 730 miliar rupiah. Nilai standar deviasi sebesar 196 miliar menunjukkan adanya variasi tingkat penerimaan DAU antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur sebesar 26,86% dibandingkan nilai rata-rata DAU, naik sedikit dari tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan penerimaan DAU Kabupaten/Kota di Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun pada tahun 2010 beberapa

kabupaten/kota memperoleh penurunan penerimaan DAU dibandingkan tahun 2009, yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupten Bojonegoro, Kabupten Kediri, dan Kota Surabaya. Penurunan penerimaan DAU terbesar diperoleh Kota Surabaya dengan prosentase penurunan DAU sebesar 14,80%. Selain itu pada tahun 2011 juga terdapat satu kabupaten/kota yang mengalami penurunan penerimaan DAU dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu Kota Kediri.

Kota Surabaya memiliki rata-rata peningkatan penerimaan DAU dari tahun ke tahun yang paling tinggi, yaitu sebesar 15,20%, sedangkan Kabupten Bondowoso menunjukkan penerimaan DAU paling rendah, yaitu sebesar 4,49%. Rata-Rata perkembangan penerimaan DAU seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur adalah sebesar 11,43%.

Melihat kondisi ini, nampak bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur masih bergantung pada Pemerintah Pusat pada Pendapatan Daerah-nya, yang nampak dalam trend penerimaan DAU yang masih meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah belum bisa sepenuhnya mengandalkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena porsi DAU sendiri masih besar dalam pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah.

4.2.3. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapitas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu tujuan dari suatu proses pembangunan yang berjalan. Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja

perekonomian, maka dibuat indikator makro yang biasa digunakan sebagai penilaian kinerja perekonomian. Indikator makro tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu wilayah atau daerah pada periode tertentu (umumnya satu tahun) tanpa memperhitungkan kepemilikan.

Tabel 4.4 menunjukkan data statistik deskriptif Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur untuk tahun 2009 – 2012 atas dasar harga konstan.

Tabel 4.4
Statistik Deskriptif PDRB Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur
Tahun 2009 – 2012 (dalam rupiah)

	2009	2010	2011	2012
Minimum	927.579	986.211	1.051.197	1.122.463
Maksimum	82.014.713	87.828.841	94.471.049	101.671.633
Rata-Rata	8.238.665	8.751.260	9.333.012	9.986.308
Standar Deviasi	13.418.654	14.352.885	15.416.368	16.588.728

Sumber: Hasil analisis data dari BPS dan Realisasi APBD

Berdasarkan Tabel 4.4 diperoleh informasi bahwa pada tahun 2009 Kota Surabaya memiliki PDRB tertinggi, dengan nilai sekitar 82 juta rupiah, sedangkan yang memiliki PDRB paling rendah adalah Kota Blitar dengan nilai sekitar 927 ribu rupiah. Rata-rata PDRB Propinsi Jawa Timur pada tahun 2009 adalah sebesar 8,2 juta rupiah. Nilai standar deviasi sebesar 13 juta menunjukkan adanya variasi perbedaan PDRB antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur sebesar 162,87%

dibandingkan nilai rata-rata PDRB, perbedaannya sangat tinggi antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur.

Tahun 2010 Kota Surabaya masih memiliki PDRB tertinggi, dengan nilai sekitar 87 juta rupiah, sedangkan yang memiliki PDRB paling rendah juga masih tetap Kota Blitar dengan nilai sekitar 986 ribu rupiah. Rata-rata PDRB Propinsi Jawa Timur pada tahun 2010 adalah sebesar 8,7 juta rupiah. Nilai standar deviasi sebesar 14 juta menunjukkan adanya variasi perbedaan PDRB antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur sebesar 164,01% dibandingkan nilai rata-rata PDRB, meningkat sedikit dibanding tahun sebelumnya.

Tahun 2011 Kota Surabaya masih memiliki PDRB tertinggi, dengan nilai sekitar 94 juta rupiah, sedangkan yang memiliki PDRB paling rendah juga masih tetap Kota Blitar dengan nilai sekitar 1 juta rupiah. Rata-rata PDRB Propinsi Jawa Timur pada tahun 2011 adalah sebesar 9,3 juta rupiah. Nilai standar deviasi sebesar 15 juta menunjukkan adanya variasi perbedaan PDRB antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur sebesar 165,18% dibandingkan nilai rata-rata PDRB, meningkat sedikit dibanding tahun sebelumnya.

Tahun 2012 Kota Surabaya masih memiliki PDRB tertinggi, dengan nilai sekitar 101 juta rupiah, sedangkan yang memiliki PDRB paling rendah juga masih tetap Kota Blitar dengan nilai sekitar 1,1 juta rupiah. Rata-rata PDRB Propinsi Jawa Timur pada tahun 2012 adalah sebesar 9,9 juta rupiah. Nilai standar deviasi sebesar 16 juta menunjukkan adanya variasi perbedaan PDRB antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur sebesar 166,11% dibandingkan nilai rata-rata PDRB, meningkat sedikit dibanding tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan dari tahun 2009 sampai dengan 2012, Kota Batu memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun yang paling tinggi, yaitu sebesar 7,70%, sedangkan Kabupaten Sampang mengalami pertumbuhan ekonomi paling rendah, yaitu sebesar 4,54%. Rata-Rata pertumbuhan ekonomi seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur adalah sebesar 6,16%.

4.2.4. Belanja Modal

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Pemerintah Daerah, yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya, atau dengan kata lain belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat lebih dari satu periode.

Tabel 4.5 menunjukkan data statistik deskriptif mengenai Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur tahun 2009 – 2012.

Tabel 4.5

**Statistik Deskriptif Belanja Modal Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur
Tahun 2009 – 2012 (dalam jutaan rupiah)**

	2009	2010	2011	2012
Minimum	77.654	51.404	68.704	65.462
Maksimum	1.143.039	1.495.708	543.112	912.716
Rata-Rata	183.409	155.588	159.894	216.457
Standar Deviasi	169.198	228.351	83.273	145.582

Sumber: Hasil analisis data dari BPS dan Realisasi APBD

Berdasarkan Tabel 4.5 diperoleh informasi bahwa pada tahun 2009 Kota Surabaya memiliki Belanja Modal terbesar, dengan nilai sekitar 1,143 triliun rupiah, sedangkan yang memiliki Belanja Modal paling rendah adalah Kabupaten Sampang dengan nilai sekitar 77 miliar rupiah. Rata-rata pengeluaran Belanja Modal Propinsi Jawa Timur pada tahun 2009 adalah sebesar 183 miliar rupiah. Nilai standar deviasi sebesar 169 miliar menunjukkan adanya variasi tingkat pengeluaran Belanja Modal antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur sebesar 92,25% dibandingkan nilai rata-rata Belanja Modal, perbedaannya tinggi di antara Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur.

Tahun 2010 Kota Surabaya masih memiliki Belanja Modal terbesar, dengan nilai sekitar 1,495 triliun rupiah, sedangkan yang memiliki Belanja Modal paling rendah adalah Kabupaten Ngawi dengan nilai sekitar 51 miliar rupiah. Rata-rata pengeluaran Belanja Modal Propinsi Jawa Timur pada tahun 2010 adalah sebesar 155 miliar rupiah, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Nilai standar deviasi sebesar 228 miliar menunjukkan adanya variasi tingkat pengeluaran Belanja Modal antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur sebesar 146,77% dibandingkan nilai rata-rata Belanja Modal, meningkat tinggi daripada tahun sebelumnya.

Tahun 2011 Kota Surabaya masih memiliki Belanja Modal terbesar, dengan nilai sekitar 543 miliar rupiah yang jauh lebih rendah daripada tahun sebelumnya, sedangkan yang memiliki Belanja Modal paling rendah adalah Kabupaten Jombang dengan nilai sekitar 68 miliar rupiah. Rata-rata pengeluaran Belanja Modal Propinsi Jawa Timur pada tahun 2011 adalah sebesar 159 miliar

rupiah, meningkat sedikit dari tahun sebelumnya. Nilai standar deviasi sebesar 83 miliar menunjukkan adanya variasi tingkat pengeluaran Belanja Modal antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur sebesar 52,08% dibandingkan nilai rata-rata Belanja Modal, jauh lebih rendah daripada tahun sebelumnya.

Tahun 2012 Kota Surabaya masih memiliki Belanja Modal terbesar, dengan nilai sekitar 912 miliar rupiah yang meningkat lagi daripada tahun sebelumnya, sedangkan yang memiliki Belanja Modal paling rendah adalah Kota Batu dengan nilai sekitar 65 miliar rupiah. Rata-rata pengeluaran Belanja Modal Propinsi Jawa Timur pada tahun 2012 adalah sebesar 216 miliar rupiah, meningkat kembali dari tahun sebelumnya. Nilai standar deviasi sebesar 145 miliar menunjukkan adanya variasi tingkat pengeluaran Belanja Modal antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur sebesar 67,26% dibandingkan nilai rata-rata Belanja Modal, sedikit meningkat daripada tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan pengeluaran Belanja Modal antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur menunjukkan kondisi fluktuatif dari tahun ke tahun, ada yang meningkat dan menurun tiap tahun. Tahun 2010 sebagian besar kabupaten/kota memiliki penurunan belanja modal, hanya Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Blitar, Kota Madiun, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya yang memiliki peningkatan pengeluaran Belanja Modal. Tahun 2011 terjadi kebalikannya, sebagian besar kabupaten/kota menunjukkan tingkat pengeluaran Belanja Modal yang lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, hanya Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, dan Kota Surabaya yang memiliki pengeluaran

Belanja Modal lebih rendah. Tahun 2012 sebagian besar kabupaten/kota memiliki peningkatan pengeluaran belanja modal, hanya Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kota Batu yang menunjukkan pengeluaran yang lebih rendah daripada tahun sebelumnya.

Sebagian besar kabupaten/kota dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan rata-rata trend peningkatan pengeluaran belanja modal, hanya Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kota Batu yang menunjukkan trend penurunan pengeluaran Belanja Modal. Kabupaten Jombang memiliki rata-rata peningkatan pengeluaran belanja modal dari tahun ke tahun yang paling tinggi, yaitu sebesar 46,99%, sedangkan Kota Batu menunjukkan trend penurunan pengeluaran belanja modal paling rendah, yaitu sebesar -20,42%. Rata-Rata pengeluaran belanja modal seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur menunjukkan trend peningkatan sebesar 14,53%.

4.2.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. IPM digunakan untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu daerah. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan status kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk. IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator sosial untuk mengukur tingkat kesenjangan

pembangunan antar daerah. Apabila semakin baik pembangunan di suatu wilayah, secara umum akan semakin tinggi IPM daerah tersebut.

Tabel 4.6 menunjukkan data statistik deskriptif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur tahun 2009 – 2012

Tabel 4.6

Statistik Deskriptif IPM Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur

Tahun 2009 – 2012 (dalam jutaan rupiah)

	2009	2010	2011	2012
Minimum	58,68	59,70	60,78	61,67
Maksimum	76,98	77,42	77,89	78,43
Rata-Rata	70,14	70,71	71,29	71,87
Standar Deviasi	4,82	4,71	4,62	4,56

Sumber: Hasil analisis data dari BPS dan Realisasi APBD

Berdasarkan Tabel 4.6 diperoleh informasi bahwa pada tahun 2009 Kota Blitar memiliki IPM tertinggi, dengan angka indeks sebesar 76,98, sedangkan yang memiliki IPM paling rendah adalah Kabupaten Sampang dengan angka indeks sebesar 58,68. Rata-rata IPM Propinsi Jawa Timur pada tahun 2009 adalah sebesar 70,14. Nilai standar deviasi sebesar 4,82 menunjukkan adanya variasi tingkat IPM antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur sebesar 6,86% dibandingkan nilai rata-rata IPM, perbedaannya tidak terlalu tinggi di antara Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur.

Tahun 2010 Kota Blitar masih memiliki IPM tertinggi, dengan angka indeks sebesar 77,42, sedangkan yang memiliki IPM paling rendah juga masih Kabupaten Sampang dengan angka indeks sebesar 59,70. Rata-rata IPM Propinsi

Jawa Timur pada tahun 2010 adalah sebesar 70,71. Nilai standar deviasi sebesar 4,71 menunjukkan adanya variasi tingkat IPM antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur sebesar 6,66% dibandingkan nilai rata-rata IPM, sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun 2011 Kota Blitar masih memiliki IPM tertinggi, dengan angka indeks sebesar 77,89, sedangkan yang memiliki IPM paling rendah juga masih Kabupaten Sampang dengan angka indeks sebesar 60,78. Rata-rata IPM Propinsi Jawa Timur pada tahun 2011 adalah sebesar 71,29. Nilai standar deviasi sebesar 4,62 menunjukkan adanya variasi tingkat IPM antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur sebesar 6,49% dibandingkan nilai rata-rata IPM, sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun 2012 Kota Malang yang memiliki IPM tertinggi, dengan angka indeks sebesar 78,43, sedangkan yang memiliki IPM paling rendah masih Kabupaten Sampang dengan angka indeks sebesar 61,67. Rata-rata IPM Propinsi Jawa Timur pada tahun 2012 adalah sebesar 71,87. Nilai standar deviasi sebesar 4,56 menunjukkan adanya variasi tingkat IPM antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur sebesar 6,34% dibandingkan nilai rata-rata IPM, sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

UNDP membedakan tingkat IPM berdasarkan empat klasifikasi, yaitu low (IPM kurang dari 50), lower-medium (IPM antara 50 – 65,99), upper-medium (IPM antara 66 dan 79,99), dan high (IPM 80 ke atas). Kabupaten Sampang yang memiliki IPM paling rendah di antara kabupaten/kota lainnya masuk dalam kategori lower medium sampai dengan tahun 2012, namun sedikit demi sedikit

mengalami peningkatan. Sampai dengan tahun 2012 beberapa kabupaten masih masuk dalam kategori lower-medium selain Kabupaten Sampang, yaitu Bondowoso, Probolinggo, dan Situbondo. Kabupaten/kota lainnya sampai dengan tahun 2012 sudah termasuk dalam kategori upper-medium. Belum ada kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori high, termasuk Kota Surabaya dan Kota Malang yang merupakan kota besar di Jawa Timur, sehingga perlu ditingkatkan lagi kualitas pembangunan manusia di Propinsi Jawa Timur.

Secara keseluruhan dari tahun 2009 sampai dengan 2012 seluruh kabupaten/kota dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan IPM. Kabupaten Sampang memiliki rata-rata peningkatan IPM dari tahun ke tahun yang paling tinggi, yaitu sebesar 1,67%, sedangkan Kabupaten Blitar dan Kota Madiun menunjukkan peningkatan IPM paling rendah, yaitu sebesar 0,55%. Rata-Rata IPM seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan peningkatan sebesar 0,83%.

4.3. Analisis Model dan Pengujian Hipotesis

4.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti sebaran normal atau tidak. Pengujian Kolmogorov Smirnov digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut mengikuti sebaran normal atau tidak. Apabila nilai signifikansi (probabilitas kesalahan atau sig.) masing-masing variabel penelitian lebih besar dari 5% atau 0,05, maka data dianggap telah terdistribusi secara normal.

Tabel 4.7**Hasil Uji Normalitas**

Variabel	Kolmogorov- Smirnov- Z	Asymp.Sig.(2 tailed)
PAD	1,317	0,062
DAU	1,140	0,148
PDRB	0,763	0,605
Belanja	0,874	0,430
IPM	1,095	0,182

Sumber : Hasil analisis data

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai statistik Kolmogorov Smirnov masing-masing variabel penelitian memiliki nilai taraf signifikan yang lebih besar dari 0,05, dimana nilai tersebut telah sesuai dengan kriteria bahwa sebaran data berdistribusi normal. Nilai signifikansi masing-masing variabel PAD, DAU, PDRB, Belanja Modal, dan IPM secara berturut-turut adalah sebesar 0,062; 0,148; 0,605; 0,430; dan 0,182, yang seluruhnya lebih besar daripada nilai taraf signifikan 0,05.

4.3.2. Analisis Path

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah Path Analysis, dengan variabel eksogen PAD, DAU, dan PDRB, serta variabel endogen Belanja Modal dan IPM. Analisis model dapat dilakukan melalui dua tahap, yaitu meregresikan variabel PAD, DAU, dan PDRB terhadap Belanja Modal, kemudian meregresikan variabel Belanja terhadap variabel IPM.

Koefisien jalur merupakan nilai standardized beta (koefisien regresi standar). Koefisien jalur dihitung melalui dua persamaan struktural, yaitu

persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dua persamaan struktural tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = b_1 \text{ PAD} + b_2 \text{ DAU} + b_3 \text{ PDRB} + e_1$$

$$\text{IPM} = b_4 \text{ Belanja} + e_2$$

4.3.2.1. Analisis Tahap I (Pengaruh PAD, DAU, PDRB Terhadap Belanja Modal)

Pengaruh PAD, DAU, dan PDRB terhadap Belanja Modal dapat diketahui dengan melakukan analisis regresi variabel PAD, DAU, dan PDRB terhadap Belanja Modal. Hasil ringkasan analisis dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8

Hasil Analisis Regresi PAD, DAU, dan PDRB Terhadap Belanja Modal

Variabel	Standardized Beta	Signifikan t (Sig.)	Adjusted R Square
PAD	0,420	0,000	0,500
DAU	0,298	0,000	
PDRB	0,185	0,003	

Sumber: Hasil Analisis Regresi PAD, DAU, PDRB - Belanja

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat diketahui bahwa:

1. Variabel PAD memiliki koefisien standardized beta positif, berarti jika variabel pada PAD terjadi peningkatan maka Belanja Modal juga mengalami peningkatan sebesar nilai standardized beta-nya yaitu 0,420. PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, karena memiliki nilai

probabilitas kesalahan (P) sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05).

2. Variabel DAU memiliki koefisien standardized beta positif, berarti jika pada variabel DAU terjadi peningkatan maka Belanja Modal juga mengalami peningkatan sebesar nilai standardized beta-nya yaitu 0,298. DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, karena memiliki nilai probabilitas kesalahan (P) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05).
3. Variabel PDRB memiliki koefisien standardized beta positif, berarti jika pada variabel PDRB terjadi peningkatan maka Belanja Modal juga mengalami peningkatan sebesar nilai standardized beta-nya yaitu 0,185. PDRB memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, karena memiliki nilai probabilitas kesalahan (P) sebesar 0,003 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05).
4. Besarnya kontribusi variabel PAD, DAU, dan PDRB terhadap variabel Belanja Modal, ditunjukkan dengan besarnya koefisien adjusted R square sebesar 0,500. Hal ini berarti 50% tingkat variasi perubahan Belanja Modal ditentukan oleh perubahan pada PAD, DAU, dan PDRB, sedangkan sisanya sebesar 50% masih ditentukan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti.

4.3.2.2. Analisis Tahap II (Pengaruh Belanja Modal Terhadap IPM)

Pengaruh Belanja Modal terhadap IPM dapat dilakukan dengan melakukan analisis regresi variabel Belanja Modal terhadap IPM. Hasil ringkasan analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9

Hasil Analisis Regresi Belanja Modal Terhadap IPM

Variabel	Standardized Beta	Signifikan t (Sig)	Adjusted R Square
Belanja	0,367	0,000	0,129

Sumber: Hasil Analisis Regresi Belanja – IPM

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat diketahui bahwa:

1. Variabel Belanja Modal memiliki koefisien standardized beta positif, berarti jika terjadi peningkatan pada Belanja Modal maka IPM juga akan mengalami peningkatan sebesar nilai standardized beta-nya yaitu 0,367. Belanja Modal memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM, karena memiliki nilai probabilitas kesalahan (P) sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 5% (0,05).
2. Besarnya kontribusi variabel Belanja Modal terhadap variabel IPM, ditunjukkan dengan besarnya koefisien adjusted R square sebesar 0,129. Hal ini berarti 12,9% tingkat variasi perubahan IPM ditentukan oleh Belanja Modal, sedangkan sisanya sebesar 87,1% masih ditentukan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti.

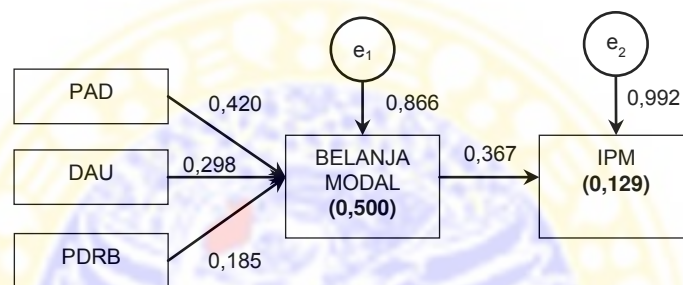
Keseluruhan hasil analisis tahap I dan tahap II dapat digambarkan ke dalam analisis path seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4.1. Besarnya nilai e_i

dapat dihitung dengan rumus $e_i = \sqrt{(1 - R^2)}$, maka nilai masing-masing e_1 dan e_2 adalah sebagai berikut:

1. Nilai $e_1 = \sqrt{(1 - 0,500^2)} = 0,866$
2. Nilai $e_2 = \sqrt{(1 - 0,129^2)} = 0,992$

Gambar 4.1

Hasil Analisis Path



4.3.3. Pengujian Hipotesis

4.3.3.1. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa nilai signifikan t PAD adalah sebesar $0,000 < \text{tingkat signifikansi } (\alpha) 5\%$ atau $0,05$, hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur, diterima.

4.3.3.2. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa nilai signifikan t DAU adalah sebesar $0,000 < \text{tingkat signifikansi } (\alpha) 5\%$ atau $0,05$, hal ini menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur, diterima.

4.3.3.3. Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa nilai signifikan t PDRB adalah sebesar $0,003 < \text{tingkat signifikansi } (\alpha) 5\%$ atau $0,05$, hal ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur, diterima.

4.3.3.4. Pengujian Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat menyatakan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa nilai signifikan t belanja modal adalah sebesar $0,000 < \text{tingkat signifikansi } (\alpha) 5\%$ atau $0,05$, hal ini menunjukkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia (IPM). Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur, diterima.

4.4. Pembahasan

Hasil analisis path menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, dan alokasi belanja modal juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal berperan dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. PAD, DAU, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara tidak langsung terhadap kualitas pembangunan manusia, melalui peningkatan alokasi belanja modal tiap daerah, sedangkan alokasi belanja modal berpengaruh langsung dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal daerah berdasarkan hasil penelitian. Hal ini disebabkan karena PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. PAD juga merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, sehingga apabila PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih besar dan tingkat kemandirian daerah juga akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah dapat berinisiatif untuk lebih meningkatkan belanja modalnya untuk melengkapi sarana dan prasarana pembangunan daerah guna pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah.

Konsisten dengan penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) bahwa peningkatan PAD Pemerintah Daerah dapat mendorong alokasi belanja modal yang lebih besar dari Pemerintah Daerah. Hasil penelitian juga sesuai dengan Nuarisa (2013) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dan pengaruhnya bersifat positif, dimana semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Ewing dan Payne (1998) juga mengungkapkan hal yang sama bahwa pendapatan pemerintah yang diperoleh dari pajak berkaitan dengan besarnya belanja yang dilakukan pemerintah. Penerimaan pemerintah dari pajak sangat penting dalam mempengaruhi besarnya belanja modal pemerintah, karena bila pengeluaran lebih besar dari penerimaan maka akan terjadi defisit pada anggaran belanja pemerintah.

Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Daerah. Tujuan pemberian DAU adalah untuk pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. DAU

digunakan sebagai jaminan keseimbangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. DAU merupakan sumber dana yang cukup dominan dan dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. DAU dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan dengan tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hal ini memberikan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Adanya transfer DAU yang cukup signifikan di dalam APBN dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, dan pemerintah secara leluasa dapat menggunakan DAU untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat melalui pengalokasian belanja modal untuk membangun wilayahnya untuk kepentingan masyarakat daerah.

Sejalan dengan penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) bahwa peningkatan DAU yang diterima oleh Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan dalam meningkatkan alokasi belanja modalnya. Sesuai juga dengan penelitian Indarti dan Sugiartana (2012), dimana DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Daerah. Alasan yang sama juga diungkapkan oleh Abdullah dan Halim (2003), bahwa ada keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja modal, dimana dalam jangka panjang transfer Pemerintah Pusat berpengaruh terhadap belanja modal Pemerintah Daerah, dan pengurangan jumlah transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal Pemerintah Daerah. Konsisten pula dengan pendapat

Nuarisa (2013) bahwa jumlah belanja modal akan dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari Pemerintah Pusat, dimana daerah yang memperoleh alokasi DAU yang besar akan memiliki peningkatan dalam alokasi untuk anggaran belanja modalnya.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur. Artinya, kondisi ekonomi daerah yang semakin baik akan membuat daerah mengalokasikan belanja modalnya lebih besar untuk kepentingan pembangunan daerahnya sendiri. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto. Melalui pertumbuhan ekonomi maka Pemerintah Daerah dapat melakukan peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Adanya kebijakan otonomi daerah mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana tergantung dari potensi masing-masing daerah itu sendiri. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian akan mempengaruhi bertumbuhnya investasi modal swasta maupun pemerintah, sehingga Pemerintah Daerah lebih baik dan leluasa dalam menyusun alokasi belanja modalnya. Adanya desentralisasi melalui kebijakan otonomi daerah akan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Karena Pemerintah Daerah memiliki informasi yang lebih lengkap tentang kebutuhan dan karakter masyarakat di daerahnya, disamping itu proses pengambilan keputusan terkait penyediaan barang dan jasa publik tidak harus melewati birokrasi yang panjang, sehingga penyediaan barang dan jasa publik akan lebih efisien, sehingga akan meningkatkan output perekonomian dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang semakin baik akan membuat Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan porsi belanja modalnya untuk pelayanan publik yang semakin meningkat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap program pembangunan daerah, sehingga menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan daerah dan dalam jangka panjang dapat mendorong peningkatan kinerja perekonomian daerah. Sejalan dengan argumen Lin dan Liu (2000) bahwa desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah, dimana pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, yang kemudian mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik.

Belanja modal memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kualitas pembangunan manusia. Belanja modal untuk kesejahteraan masyarakat tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar dilakukan untuk menyiapkan peserta didik agar mampu masuk dalam pasaran kerja, namun lebih daripada itu, pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan watak bangsa (*national character building*), sehingga pendidikan merupakan landasan untuk menjadikan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Melalui pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal peran Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan realisasi belanja modal dalam pelayanan publik menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan pertimbangan bahwa daerah yang

lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan kualitas pembangunan manusia. Karena pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia, sehingga Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan ini dalam penyusunan anggaran. Penekanan terhadap pentingnya peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan menjadi suatu kebutuhan, karena kualitas manusia di suatu wilayah memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan daerahnya.

Hasil penelitian juga konsisten dengan penelitian Christy dan Adi (2009) bahwa belanja modal terbukti berpengaruh signifikan positif signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia. Sejalan juga dengan pendapat Mardiasmo (2002) yang menyatakan bahwa alokasi belanja modal akan memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Konsisten juga dengan argumen Mirza (2012) bahwa ada keterkaitan sangat erat antara belanja modal dengan Indeks Pembangunan Manusia, dimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia dapat membentuk karakter manusia yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, keikhlasan, kesederhanaan dan keteladanan.